

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pembentukan BPD sesungguhnya merupakan proses penciptaan lembaga demokrasi desa. BPD adalah badan yang mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada desa dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan analisis pada Bab V sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa Kuaklalo dapat menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui forum formal dan forum informal serta faktor-faktor yang mempengaruhi BPD dalam menjalankan perannya tersebut adalah:

A. Menjaring dan menyalurkan aspirasi melalui forum formal

1. Terlibat dalam musyawarah tingkat dusun

Musyawarah tingkat dusun ialah kegiatan musyawarah yang diselenggarakan oleh kepala dusun yang bertugas membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diwilayah dusun. Karena kurangnya koordinasi dari kepala desa menyebabkan ruang musyawarah dusun didesa Kuaklalo tidak berjalan semestinya. BPD Kuaklalo pun tidak mengambil andil untuk bekerjasama dengan kepala-kepala dusun supaya berkoordinasi dengan kepala desa untuk

bisa terselenggaranya penjangkaran aspirasi masyarakat tingkat dusun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peranan BPD Kuaklalo dalam keterlibatannya pada musyawarah tingkat dusun ialah:

a) Faktor kesibukan anggota BPD

Kesibukan anggota BPD diluar profesinya sebagai anggota BPD membuat terbaginya konsentrasi kerja anggota BPD Kuaklalo dalam menjalankan perannya sebagai agen demokrasi desa. Jarak tempat kerja anggota BPD Kuaklalo menyebabkan tersitanya waktu dan tenaga mereka sehingga kurang terjalannya kerjasama antara BPD dan kepala dusun untuk dapat terselenggaranya kegiatan musyawarah dusun di Desa Kuaklalo.

b) Faktor gaji

Semangat menjalankan peranan BPD dalam pengakomodiran aspirasi masyarakat juga dipengaruhi oleh besaran gaji yang diterima oleh anggota BPD Kuaklalo. Gaji yang diterima terbilang kecil membuat kepasifan anggota BPD dalam menjalankan peranannya pengakomodiran aspirasi-aspirasi masyarakat tingkat dusun. Gaji anggota sebesar RP.400.000/bulan dan gaji ketua BPD sebesar 500.000/bulan dirasa kurang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Hal tersebut menyebabkan BPD menjadi tidak bersemangat dalam penjalanan kerjasama dengan kepala-kepala dusun untuk terselenggaraanya musyawarah tingkat dusun.

2. Menyelenggarakan musyawarah desa

Musyawarah desa adalah forum yang diselenggarakan oleh anggota BPD. Namun dalam implementasinya di desa Kuaklalo BPD tidak menyelenggarakan musyawarah desa. Forum tersebut diambil alih oleh kepala desa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peranan BPD dalam penyelenggaraan musyawarah desa adalah:

- a) Faktor kapasitas dan ketidakpahaman BPD Kuaklalo tentang tugas dan fungsinya

Meskipun secara tingkat pendidikan anggota BPD Kuaklalo cukup tinggi namun karena tidak adanya pelatihan-pelatihan secara rutin oleh pemerintah desa kepada badan permusyawaratan desa Kuaklalo menyebabkan kualitas badan permusyawaratan desa kurang optimal. Pelatihan pengembangan kapasitas perlu dilakukan agar badan permusyawaratan bisa paham tugas dan fungsinya. Masalah kapasitas badan permusyawaratan desa Kuaklalo membuat mereka belum paham secara mendetail tugas dan fungsi mereka. pemerintah desa seharusnya melakukan pendiklatan serta pelatihan-pelatihan kepada BPD Kuaklalo.

- b) Faktor Praktik Nepotisme yang berlangsung di Desa Kuaklalo

Perekrutan anggota BPD oleh kepala desa yang tidak meninjau kemampuan menyebabkan tersendatnya peran BPD dalam menampung aspirasi masyarakat. Kepala desa Kuaklalo yang

mengangkat anggota BPD berdasarkan ikatan kekeluargaan dan kedekatan tanpa menilai kemampuan mereka dalam merangkul masyarakat untuk pengakomodiran aspirasi-aspirasi mereka yang kemudian diperjuangkan dalam penentuan prioritas pembangunan.

c) Faktor BPD sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa

Hubungan kepala desa dan BPD sudah tidak harmonis lagi dimana keduanya tidak saling bermitra. Kepala desa mengabaikan kesepakatan yang dibangun dalam pembahasan bersama antara kepala desa dengan BPD maupun kesepakatan dalam musyawarah desa. Kepala desa bisa menetapkan peraturan desa dengan mengabaikan BPD dan musyawarah desa. Sehingga kebijakan yang di buat oleh Kepala Desa bisa saja tidak berpihak pada masyarakat atau merugikan masyarakat desa.

3. Terlibat dalam musyawarah rencana pembangunan desa

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Peran BPD dalam keterlibatannya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan dalam musyawarah rencana pembangunan desa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi BPD dalam perjuangan menyalurkan aspirasi masyarakat ialah:

a) Faktor dominatif kepala desa

Kepala desa lebih dominan berkuasa dalam menentukan kebijakan di desa. Sedangkan BPD hanya menyepakati program kerja dan kebijakan yang telah dibuat oleh kepala desa tanpa diadakan rapat antara kepala desa dengan BPD. Karakter mendominasi dari kepala desa yang menentukan prioritas pembangunan menjadi problematik BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Kebijakan yang sebelumnya dirumuskan dalam musyawarah desa, namun dalam penentuan skala prioritasnya itu berdasarkan keputusan pemerintah desa.

b) Faktor partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat mempengaruhi peranan BPD dalam menyalurkan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat yang kurang dalam keikutsertaan dalam forum musyawarah rencana pembangunan desa yang rendah menyebabkan penentuan prioritas pembangunan menjadi tidak optimal. Musyawarah rencana pembangunan desa menjadi tidak partisipatif dan demokratis. Konflik sosial dan politik antar pemerintah desa dan masyarakat menjadi momok ketidakaktifan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. Menjaring aspirasi masyarakat melalui forum informal

Badan Permusyawaratan Desa Kuaklalo, dalam menjaring aspirasi masyarakat sudah memanfaatkan forum informal ini untuk dapat mendengar aspirasi masyarakat. Baik dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat maupun memanfaatkan kanal-kanal alternatif di Desa Kuaklalo. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peranan BPD dalam menjaring aspirasi masyarakat melalui forum informal yaitu:

- a) Faktor kekerabatan dalam kegiatan berinteraksi langsung dengan masyarakat

Kegiatan kelompok di desa Kuaklalo dimanfaatkan oleh anggota BPD dalam penjangkauan aspirasi masyarakat. Meskipun belum optimal namun ini cukup efektif mengingat partisipasi masyarakat yang kurang dalam forum formal untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kegiatan arisan menjadi ruang kebersamaan pertemuan masyarakat untuk berkumpul dan anggota BPD dapat berbaur untuk mendengar manakala dalam kegiatan tersebut masyarakat menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka.

- b) Faktor budaya mempengaruhi peranan BPD dalam menjaring aspirasi masyarakat dengan pemanfaatan kanal-kanal alternatif desa.

Menjadi masyarakat desa sudah barang tentu bila ritus budaya menjadi tradisi dalam suatu kampung. Sama halnya yang terjadi di desa

Kuaklalo, masyarakat begitu antusias dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. BPD melihat peluang dalam kegiatan tersebut untuk mendengar aspirasi-aspirasi masyarakat.

6.2 saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

A. Menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui forum formal.

1. Terlibat dalam musyawarah tingkat desa

- Bagi pemerintah desa Kuaklalo untuk dapat mengkoordinasi kepala dusun maupun BPD untuk dapat memfungsikan kembali forum musyawarah tingkat dusun agar aspirasi-aspirasi masyarakat dapat diakomodir dengan optimal serta memberi insentif yang cukup bagi anggota BPD agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
- Bagi anggota BPD untuk bisa mempertanggungjawabkan tugas sebagai badan penyelenggaran demokrasi di desa. BPD mempunyai tugas yang sangat penting untuk berjalanya kegiatan demokrasi desa.

2. Menyelenggarakan musyawarah desa

- Untuk BPD Kuaklalo untuk berkoordinasi dengan kepala desa supaya bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan penguatan Kapasitas BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta BPD.
- Untuk kepala desa, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten untuk melakukan pelatihan secara rutin kepada anggota BPD untuk menguatkan serta mengembangkan kapasitas mereka sebagai lembaga permusyawaratan desa.
- Untuk kepala desa Kuaklalo kedepannya memperhatikan cara perekrutan atau pengangkatan anggota BPD untuk meninjau kemampuan mereka baik secara akademis maupun kemampuan mengelola lingkungan masyarakat agar BPD dapat menjalankan perannya berdasarkan dengan baik. Pengangkatan anggota BPD tidak boleh berdasarkan faktor kedekatan maupun kekeluargaan.
- Untuk kepala desa haruslah merumuskan kebijakan desa berdasarkan keputusan bersama. Bukan karena kepentingan pribadi maupun kelompok, agar tidak menimbulkan sentimen negatif dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Terlibat dalam musyawarah rencana pembangunan desa

- Untuk kepala desa kuakalalo agar tidak mengedepankan sifat dominatif dalam penentuan prioritas pembangunan desa. Kepala desa harus menimbang berdasarkan kebutuhan masyarakat desa agar terjalin kerjasama yang baik antar pemerintah desa maupun masyarakat jika keputusan tersebut direalisasikan.
- Untuk masyarakat desa Kuaklalo agar bisa meninggalkan keegoisan mereka karena konflik sosial dan politik yang terjadi. Masyarakat dan pemerintah desa harusnya bisa saling bekerjasama untuk membangun desa menjadi lebih baik hingga masyarakat menjadi sejahtera.
- Untuk anggota BPD agar lebih optimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. BPD tidak boleh hanya menyepakati keputusan dari kepala desa tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

B. Menjaring aspirasi masyarakat melalui forum informal

- Bagi BPD Kuaklalo agar lebih optimal lagi dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat. BPD harus menjemput aspirasi masyarakat agar terciptanya ruang demokrasi yang baik di Desa Kuaklalo.